

Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia: Analisis Data Panel

Dian Novita Sari¹, Nurlina², Safuridar³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Samudra

E-mail: diannovita435@gmail.com¹, nurlina@unsam.ac.id², safuridar@unsam.ac.id³

Article History:

Received: 03 Juli 2026

Revised: 26 Agustus 2026

Accepted: 02 September 2026

Keywords:

Belanja Pemerintah, Fungsi Kesehatan, Fungsi Pendidikan, Fungsi Ekonomi, Fungsi Perlindungan Sosial, IPM.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia selama periode 2015–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah IPM, sedangkan variabel bebas meliputi belanja pemerintah fungsi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial belanja pemerintah fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sebaliknya, belanja pemerintah fungsi perlindungan sosial berpengaruh negatif dan signifikan, yang mengindikasikan adanya bantuan yang bersifat konsumtif. Secara simultan, seluruh variabel belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,9153.

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas hidup masyarakat pada hakikatnya merupakan tujuan akhir sekaligus tolak ukur fundamental bagi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Salah satu instrumen universal yang digunakan untuk mengukur dimensi keberhasilan tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mengintegrasikan komponen pencapaian umur panjang dan sehat, pengetahuan atau pendidikan, dan standar hidup layak (*United Nations Development Programme* [UNDP], 2015). Di Indonesia, akselerasi capaian IPM menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis karena adanya disparitas wilayah dan keterbatasan kapasitas fiskal. Konstitusi telah mengamanatkan bahwa negara wajib hadir dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara melalui intervensi anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai instrumen kebijakan fiskal, belanja pemerintah memegang peranan stimulatif dan redistributif yang sangat krusial dalam mendorong produktivitas serta kapabilitas masyarakat. Alokasi pengeluaran publik pada sektor-sektor strategis dinilai mampu menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif. Melalui pembagian fungsi belanja yang diatur oleh otoritas keuangan, pemerintah secara periodik mengucurkan anggaran yang difokuskan pada pemenuhan aspek-aspek

mendasar manusia. Pengelolaan belanja yang optimal secara teoretis akan berkorelasi linear terhadap perbaikan indikator-indikator penyusun kesejahteraan. Namun, efektivitas penyerapan anggaran publik ini kerap memicu perdebatan di kalangan ekonom, terutama terkait sejauh mana efisiensi dan ketepatan sasaran dari realisasi belanja tersebut dalam menstimulus aspek pembangunan manusia (Todaro & Smith, 2015).

Ulasan empiris mengenai pengaruh belanja pemerintah terhadap IPM telah banyak didiskusikan oleh para peneliti terdahulu dengan hasil yang bervariasi. Studi yang dilakukan oleh Harsono et al. (2024), Kurnia et al. (2023), serta Asnidar et al. (2025) menunjukkan bahwa belanja pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap penguatan modal manusia (human capital) serta mampu meningkatkan IPM secara berkala. Selaras dengan hal tersebut, Damanik et al. (2022) dalam penelitiannya mengonfirmasi bahwa ekspansi anggaran fungsi ekonomi dan kesehatan memiliki dampak substansial dalam mendorong produktivitas masyarakat jika dialokasikan secara bersama-sama.

Namun demikian, perbedaan hasil penelitian sering kali dijumpai pada efektivitas beberapa fungsi belanja lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Fahraini et al. (2024) serta Siregar et al. (2023) di daerah justru menemukan bahwa pengeluaran untuk sektor pendidikan memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan, sementara sektor kesehatan dan perlindungan sosial tidak menunjukkan pengaruh nyata terhadap IPM. Lebih lanjut, Setiawan dan Fikriah (2020) mengindikasikan bahwa alokasi jaring pengaman sosial yang tidak tepat sasaran justru berdampak menurunkan IPM karena memicu fenomena ketergantungan bantuan (*welfare dependency*) yang bersifat konsumtif. Kesenjangan empiris (*research gap*) inilah yang mendasari pentingnya dilakukan kajian ulang yang lebih komprehensif. Terlebih lagi, dinamika perekonomian Indonesia sepanjang periode 2015–2024 diwarnai oleh berbagai guncangan struktural, termasuk fase pemulihan pascapandemi yang mendistorsi prioritas alokasi fiskal secara masif.

LANDASAN TEORI

Secara makroekonomi, peran pengeluaran pemerintah dianalisis melalui beberapa pendekatan. Teori Keynesian memandang belanja negara sebagai komponen suntikan (*injection*) langsung dalam pendapatan nasional yang memicu efek pengganda (*multiplier effect*) (Keynes, 1936). Sementara itu, Teori Rostow dan Musgrave menyatakan bahwa pada tahap awal perkembangan suatu negara, persentase belanja publik terhadap pendapatan nasional cenderung tinggi demi menyediakan prasarana dasar, dan akan bergeser ke arah proteksi serta kesejahteraan sosial pada tingkat pembangunan yang lebih maju (Musgrave, 1969).

Dari sudut pandang mikro-sosial, Teori Pembangunan Manusia yang diinisiasi melalui *Capabilities Approach* oleh Sen (1999) dan Haq (1995) memosisikan anggaran publik sebagai investasi modal manusia (*human capital investment*) yang krusial. Alokasi anggaran pendidikan secara fungsional ditujukan untuk memperluas akses dan mutu edukasi yang berkorelasi linear terhadap angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Anggaran kesehatan diarahkan pada peningkatan fasilitas medis guna mendongkrak angka harapan hidup (AHH), serta sektor ekonomi dan perlindungan sosial memperkuat daya beli masyarakat guna meraih standar hidup layak.

Di samping pemenuhan kebutuhan dasar manusia, belanja pemerintah yang dialokasikan pada fungsi ekonomi memiliki transmisi mekanisme yang penting dalam menstimulus kesejahteraan melalui penciptaan lapangan kerja dan penyediaan infrastruktur konektivitas. Ekspansi anggaran fiskal pada sektor ekonomi teoretis mampu menurunkan biaya logistik, mendorong efisiensi rantai pasok, dan memperkuat daya saing sektor usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM) (Todaro & Smith, 2015). Stimulus ini pada gilirannya akan menggerakkan roda perekonomian domestik, meningkatkan pendapatan per kapita secara agregat, serta memperkuat daya beli riil masyarakat. Dalam konteks pengukuran pembangunan nasional, perbaikan pada aspek-aspek tersebut secara langsung merefleksikan peningkatan komponen standar hidup layak, yang merupakan salah satu dimensi krusial dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Namun demikian, belanja fungsi perlindungan sosial dirancang sebagai instrumen jaring pengaman (*social safety net*) untuk melindungi kelompok rentan agar tidak jatuh di bawah batas minimum kapabilitas hidup (Barr, 2020). Namun, dalam kerangka Teori Pembangunan Manusia, jika bantuan sosial perlindungan sosial terlalu didominasi oleh skema karitatif yang konsumtif jangka pendek tanpa adanya penguatan kapasitas kemandirian, alokasi tersebut justru berisiko mendistorsi motivasi produktif masyarakat (*welfare dependency*). Kondisi ini dapat menghambat perluasan kapabilitas riil yang berkelanjutan dan memberikan dampak kontraktif terhadap penguatan komponen standar hidup layak jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk data panel yang menggabungkan antara data *time series* berupa data tahunan selama periode 2015–2024 dan data *cross-section* 34 provinsi di Indonesia, sehingga total data yang digunakan adalah 340 sampel, bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan variabel bebas terdiri dari empat fungsi belanja pemerintah, yaitu Belanja Fungsi Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Perlindungan Sosial. Menurut (Basuki & Prawoto, 2021) model persamaan dari regresi data panel adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e$$

Kemudian di transformasikan sehingga mudah untuk di interpretasikan menjadi:

$$Y = \alpha + \beta_1 \log(X_1)_{it} + \beta_2 \log(X_2)_{it} + \beta_3 \log(X_3)_{it} + \beta_4 \log(X_4)_{it} + e$$

Dimana:

Y = indeks pembangunan manusia

α = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = koefisien regresi

X_1 = belanja pemerintah bidang kesehatan

X_2 = belanja pemerintah bidang pendidikan

X_3 = belanja pemerintah bidang ekonomi

X_4 = belanja pemerintah bidang perlindungan sosial

e = *error term*

i = data silang 34 provinsi di Indonesia

t = tahun

Teknik analisis data dilakukan melalui perangkat lunak Eviews 12 dengan tiga tahap pendekatan estimasi model regresi data panel, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Pemilihan model empiris terbaik ditentukan melalui serangkaian pengujian statistik, meliputi Uji Chow (untuk memilih antara CEM dan FEM) serta Uji Hausman (untuk memilih antara FEM dan REM). Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan secara parsial melalui statistik uji t, secara simultan melalui statistik uji F, serta koefisien

determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Model Estimasi Data Panel

Tabel 1. Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

Model Estimasi Data Panel	Prob.
Uji <i>Chow</i>	0,0000
Uji <i>Hausman</i>	0,0447

Berdasarkan Tabel 1 hasil dari pemilihan model regresi data panel, dapat dilihat bahwa pada uji *chow* nilai *probability* sebesar $0,0000 < 0,05$. Artinya model yang terpilih adalah *fixed effect model*. Dan pada uji *hausman* nilai *probability* sebesar $0,0447 < 0,05$. Artinya model yang terpilih *fixed effect model*. Maka dapat disimpulkan bahwa *fixed effect model* merupakan model yang terbaik yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Tabel 2. Hasil Estimasi *Fixed Effect Model* (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	42.31416	3.551608	11.91408	0.0000
Log(X_1)	0.398373	0.180561	2.206303	0.0281
Log(X_2)	0.586963	0.114699	5.117446	0.0000
Log(X_3)	0.635330	0.104460	6.082038	0.0000
Log(X_4)	-0.625632	0.211353	-2.960128	0.0033
R-squared	0.924565	Mean dependent var		70.95085
Adjusted R-squared	0.915323	S.D. dependent var		4.149993
F-statistic	100.0391	Durbin-Watson stat		0.826162
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan Tabel 2, maka hasil estimasi *fixed effect model* diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = 42,31416 + 0.398373\text{Log}(X_1)_{it} + 0,586963\text{Log}(X_2)_{it} + 0,635330\text{Log}(X_3)_{it} - 0,625632\text{Log}(X_4)_{it}$$

Uji Hipotesis

Berdasarkan tabel 2, Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial variabel belanja pemerintah sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi dan perlindungan sosial berpengaruh signifikan terhadap IPM di Indonesia. Hal ini karena semua nilai probabilitas masing-masing variabel yang berada di bawah nilai taraf signifikansi 0,05.

Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama), seluruh variabel belanja fungsi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Hasil tersebut dibuktikan melalui nilai *Prob(F-statistic)* sebesar 0,000000 yang lebih kecil dari 0,05.

Hasil koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai *Adjusted R-square* sebesar 0,915323 atau 91,5323%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel belanja pemerintah mampu menjelaskan variabel IPM sebesar 91,5323%, sedangkan sisanya 8,9675% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini.

Pembahasan**Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap IPM**

Berdasarkan hasil estimasi, belanja pemerintah pada sektor kesehatan terbukti memberikan kontribusi positif dan signifikan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia sepanjang kurun waktu 2015–2024. Temuan ini memperkuat studi terdahulu yang dilakukan oleh Simamora et al. (2024), namun bertolak belakang dengan penelitian Fahraini et al. (2024) yang mengindikasikan adanya pengaruh negatif akibat inefisiensi alokasi anggaran. Perbedaan hasil ini menegaskan bahwa ekspansi kebijakan fiskal di sektor kesehatan memerlukan dukungan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel agar mampu memberikan dampak nyata. Secara teoretis, hubungan kausalitas positif ini selaras dengan *Human Development Theory* yang dipelopori oleh Sen (1999) serta Haq (1995), di mana pemenuhan derajat kesehatan diposisikan sebagai pilar investasi modal manusia yang paling mendasar untuk mendorong produktivitas masyarakat. Di Indonesia, konsep ini diimplementasikan melalui kebijakan Kementerian Keuangan (2024) dan Kementerian Kesehatan (2024) yang memprioritaskan program promotif-preventif, pemenuhan ketersediaan obat esensial, dan pemerataan fasilitas kesehatan dasar antardaerah.

Meskipun demikian, data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) mengindikasikan adanya disparitas alokasi yang cukup tajam, di mana wilayah padat penduduk di Pulau Jawa secara absolut mendominasi penyerapan anggaran. Namun, sebuah anomali positif terjadi pada periode krisis pandemi tahun 2020–2021. Berdasarkan mandat UU No. 6/2018 dan PP No. 21/2020, seluruh provinsi di Indonesia kompak merealisasikan lonjakan belanja kesehatan demi penanggulangan COVID-19. Intervensi darurat dari otoritas fiskal ini terbukti efektif dalam memitigasi penurunan drastis Angka Harapan Hidup (AHH), sehingga tren pertumbuhan IPM di tingkat regional mampu bertahan positif meski berada di tengah pembatasan mobilitas yang ketat (PSBB/PPKM). Laporan berkala DJPK pascapandemi (setelah tahun 2021) mengonfirmasi adanya normalisasi postur fiskal melalui penurunan nominal belanja kesehatan di Jawa dan Aceh, seiring dengan dialihkannya prioritas anggaran menuju pemulihan ekonomi sektor infrastruktur dan pemberdayaan UMKM.

Sebaliknya, fenomena berbeda terjadi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) seperti Papua Barat dan Maluku yang justru mencatatkan tren kenaikan belanja kesehatan pascakrisis. Lonjakan alokasi fiskal di Papua Barat didorong secara ketat oleh regulasi *earmarking* minimum 20% untuk fungsi kesehatan melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II (UU No. 2/2021). Sementara itu, perluasan belanja fiskal di Maluku difokuskan untuk mengatasi kendala isolasi geografis melalui pengadaan moda transportasi Puskesmas Keliling Air (Bappeda Provinsi Maluku, 2023). Divergensi pola penganggaran ini merefleksikan tingkat kematangan infrastruktur publik antarwilayah. Provinsi di Pulau Jawa mulai melakukan rasionalisasi anggaran karena fasilitas medisnya telah mapan, sedangkan wilayah timur memanfaatkan alokasi dana afirmatif secara agresif untuk mengejar ketertinggalan aksesitas layanan kesehatan. Secara garis besar, pengeluaran fungsi kesehatan merupakan instrumen fiskal yang sangat strategis dalam mendongkrak capaian IPM, di mana efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan kualitas tata kelola kelembagaan di daerah.

Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap IPM

Berdasarkan hasil estimasi, menunjukkan bahwa belanja pemerintah sektor pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia selama periode 2015–2024. Temuan ini mendukung studi Fahraini et al. (2024), namun

bertolak belakang dengan kajian Siregar et al. (2023) yang menemukan dampak negatif ketika anggaran terlalu berfokus pada pembangunan fisik semata (*capital expenditure-centric*). Kontradiksi ini mengisyaratkan bahwa perluasan fiskal harus diimbangi dengan alokasi substantif non-fisik, seperti peningkatan kompetensi guru dan mutu pembelajaran, agar konversi anggaran menjadi peningkatan IPM berjalan optimal. Secara teoretis, korelasi positif ini divalidasi oleh *Human Development Theory* (Sen, 1999; Haq, 1995) yang menempatkan pendidikan sebagai kapabilitas dasar perluasan kebebasan manusia, serta teori pertumbuhan endogen mengenai investasi modal manusia (*human capital investment*) sebagai motor penggerak produktivitas jangka panjang (Todaro & Smith, 2015). Konstitusi melandasi kebijakan ini melalui skema *mandatory spending* minimal 20% APBD yang diturunkan ke dalam program strategis Kementerian Pendidikan (2023).

Data menunjukkan disparitas alokasi di mana provinsi padat penduduk di Pulau Jawa (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur) mendominasi serapan anggaran secara absolut. Meski demikian, seluruh provinsi mencatat lonjakan pengeluaran kolektif pada krisis pandemi COVID-19 demi membiayai operasional darurat sistem pembelajaran jarak jauh berbasis digital. Pascapandemi, laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2023) mengonfirmasi adanya fluktuasi dan penurunan nominal belanja akibat kebijakan penyesuaian prioritas (*refocusing*) serta realokasi dana ke sektor pemulihan ekonomi non-pendidikan. Di DKI Jakarta, dinamika politik anggaran lokal dan efisiensi berkala bahkan memicu gejolak anggaran yang dalam jangka pendek berdampak pada lambatnya akselerasi IPM (Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2023).

Jika dianalisis lebih dalam, terdapat ketimpangan struktural yang tajam antara Pulau Jawa dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Provinsi di Pulau Jawa yang infrastrukturnya telah matang mampu mengalokasikan anggaran langsung pada peningkatan mutu non-fisik seperti kurikulum digital dan teknologi informasi. Sebaliknya, wilayah KTI (Papua, Papua Barat, Maluku, NTT) dihadapkan pada tantangan geografis berat, kelangkaan guru, dan tingginya biaya logistik material. Data Badan Pusat Statistik (2023) mencatat Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di wilayah timur berada di level ekstrem (berkisar 130 hingga lebih dari 180). Ketimpangan biaya riil dan besarnya beban DAK Nonfisik untuk Tunjangan Khusus Guru (TKG) di daerah 3T inilah yang menjelaskan mengapa indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di wilayah timur bergerak lambat meski nominal anggarannya naik (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Secara keseluruhan, anggaran pendidikan merupakan instrumen fiskal strategis yang menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap standar hidup layak, namun efektivitasnya ditentukan oleh kualitas pembelanjaan (*quality of spending*) dan pemerataan spasial antardaerah.

Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Ekonomi terhadap IPM

Berdasarkan hasil estimasi, belanja pemerintah sektor ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap capaian IPM di Indonesia selama periode 2015–2024. Dampak nyata dari stimulus fiskal ini terutama mentransformasi dimensi standar hidup layak yang diproyeksikan melalui nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Temuan ini selaras dengan studi Omairah et al. (2026) mengenai kontribusi nyata pengeluaran fungsi ekonomi terhadap perwujudan pembangunan wilayah yang inklusif. Namun, hasil ini bertolak belakang dengan kajian Oktafiyana dan Muliati (2024) yang menemukan dampak tidak signifikan apabila alokasi belanja terlalu bias pada proyek fisik padat modal di perkotaan yang minim penyerapan tenaga kerja lokal. Perbedaan *output* riset ini memberikan penekanan pentingnya peningkatan kualitas pembelanjaan (*quality of spending*). Secara konseptual, korelasi positif ini sejalan dengan *Human Development Approach* (Sen, 1999) yang memandang intervensi fiskal sebagai penyedia modal sosial publik guna

memperluas kapabilitas material masyarakat melalui pembangunan infrastruktur konektivitas, peningkatan produktivitas sektor primer, dan stimulus digitalisasi bagi pelaku UMKM.

Data dari DJPK kembali memperlihatkan adanya kesenjangan spasial, di mana provinsi dengan aktivitas ekonomi tinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara secara konsisten mendominasi penyerapan dana fungsi ekonomi. Sebelum masa pandemi, DKI Jakarta membukukan realisasi belanja tertinggi untuk menuntaskan megaprojek transportasi massal (MRT dan LRT) serta infrastruktur pendukung Asian Games 2018 guna mengurai inefisiensi akibat kemacetan aglomerasi. Sebaliknya, penurunan alokasi fiskal secara absolut sempat dialami oleh Provinsi Bali pada awal periode pengamatan sebagai akibat dari kebijakan penataan ulang (*refocusing*) pasca-selesainya siklus proyek tahun jamak (*multi-years*). Rendahnya nominal belanja ekonomi pemerintah di Bali tidak merefleksikan kinerja makro yang buruk, melainkan menunjukkan karakteristik struktur ekonominya yang bertumpu pada sektor pariwisata matang yang dominan digerakkan oleh investasi swasta.

Dinamika penganggaran sektor ekonomi menjadi semakin kompleks pada saat krisis pandemi COVID-19 terjadi, di mana anggaran proyek fisik berskala besar dialihkan secara masif untuk mendanai jaring pengaman ekonomi, bantuan sosial produktif, dan program padat karya tunai. Memasuki fase pemulihan, tren belanja kembali bergerak ekspansif yang diindikasikan oleh lompatan anggaran yang signifikan di daerah kaya sumber daya alam, seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Riau. Dari perspektif spasial, terdapat ketimpangan struktural yang tajam antara Pulau Jawa dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Di Pulau Jawa, penambahan infrastruktur ekonomi langsung terkoneksi dengan rantai pasok industri padat penduduk sehingga memberikan dampak instan terhadap pendapatan riil warga dan akselerasi IPM. Sebaliknya di wilayah KTI (Papua, Maluku, dan NTT), besarnya alokasi anggaran ekonomi cenderung habis terserap oleh tingginya biaya logistik material akibat tingginya tingkat kemahalan konstruksi regional (BPS). Akibatnya, lompatan *output* ekonomi dan akselerasi komponen standar hidup layak di wilayah timur berjalan lebih lambat dalam jangka pendek. Secara keseluruhan, belanja fungsi ekonomi merupakan instrumen fiskal strategis penopang IPM, namun efektivitasnya sangat bergantung pada penguatan konektivitas sentra produksi dan penguatan kapasitas tata kelola daerah.

Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial terhadap IPM

Berdasarkan hasil estimasi, belanja pemerintah bidang perlindungan sosial ternyata menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan terhadap capaian IPM di Indonesia selama periode 2015–2024. Hasil pengujian ini sejalan dengan kajian empiris dari Setiawan dan Fikriah (2020) yang menunjukkan bahwa perluasan dana bantuan sosial tidak secara otomatis mampu mengerek kualitas pembangunan manusia. Secara logis empiris, fenomena ini terjadi karena lonjakan alokasi dana perlindungan sosial pada umumnya merupakan bentuk kebijakan kontra-siklus atau reaksi spontan pemerintah ketika angka kemiskinan sedang meningkat atau saat terjadi guncangan krisis ekonomi secara makro. Akibatnya, anggaran tersebut cenderung berfungsi sebagai instrumen penahan dampak buruk krisis agar tingkat kesejahteraan masyarakat bawah tidak merosot lebih dalam, bukan sebagai motor penggerak utama untuk menaikkan status pembangunan manusia secara berkala.

Secara teoretis, dampak kontraktif ini dapat ditelaah melalui konsep ketergantungan kesejahteraan (*welfare dependency*) yang dikemukakan oleh Charles Murray (1984), serta Teori Lingkaran Setan Kemiskinan dari Ragnar Nurkse (1953). Kelemahan struktural dari tata kelola bantuan sosial muncul apabila program proteksi di daerah terlalu didominasi oleh skema bantuan

jangka pendek yang bersifat karitatif dan konsumtif, seperti bantuan tunai langsung tanpa prasyarat yang ketat. Distribusi bantuan yang bersifat instan ini dalam jangka panjang berisiko menciptakan jebakan kesejahteraan (*welfare trap*), di mana kelompok masyarakat penerima manfaat menjadi sangat bergantung pada pasokan dana stimulus pemerintah. Dampak negatifnya, motivasi intrinsik masyarakat untuk berpartisipasi secara mandiri di pasar tenaga kerja produktif justru melemah. Anggaran fiskal daerah yang bernilai besar akhirnya habis tergerus hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian yang bersifat sementara, gagal mentransformasi kapabilitas produktif masyarakat, dan pada akhirnya mengurangi ruang fiskal untuk belanja modal daerah yang memiliki dampak pembangunan jangka panjang.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran DJPK, wilayah padat penduduk di Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta, mencatatkan pengeluaran fungsi perlindungan sosial tertinggi ketika puncak krisis pandemi terjadi demi menjaga stabilitas daya beli masyarakat perkotaan. Memasuki fase pascapandemi, tren anggaran perlindungan sosial di Pulau Jawa mulai mengalami penurunan yang konsisten seiring dengan pulihnya geliat ekonomi masyarakat secara mandiri. Sebaliknya, provinsi di kawasan timur Indonesia (Papua, Maluku, dan NTT) justru harus memperpanjang dan mempertahankan skema bantuan sosial ini dalam jangka waktu yang lebih lama. Hal ini dipicu oleh tingginya harga kebutuhan pokok dan mahalannya rantai pasok logistik wilayah akibat tingginya Indeks Kemahalan Konstruksi (BPS). Kondisi objektif inilah yang menyebabkan mengapa peningkatan anggaran perlindungan sosial di wilayah timur tidak mampu berkorelasi linear terhadap kenaikan peringkat IPM dalam jangka pendek. Secara keseluruhan, studi ini memberikan rekomendasi kebijakan yang kuat bahwa pemerintah daerah harus segera melakukan reorientasi strategi jaring pengaman sosial, yaitu dengan mengubah skema bantuan yang bersifat konsumtif menjadi bantuan yang bersifat produktif melalui integrasi program pelatihan kerja (*upskilling*) dan pendampingan modal usaha yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Belanja pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan belanja pemerintah bidang perlindungan sosial memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Lebih lanjut, IPM di Indonesia secara signifikan dipengaruhi oleh seluruh variabel belanja pemerintah tersebut secara bersama-sama (simultan). Hasil penelitian ini memberikan refleksi teoretis bahwa besarnya anggaran pemerintah tidak secara otomatis meningkatkan capaian pembangunan manusia apabila tidak diikuti dengan pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran, sebagaimana terlihat pada dampak negatif kebijakan belanja perlindungan sosial terhadap IPM.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan variabel belanja pemerintah fungsi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan sosial sebagai faktor yang memengaruhi IPM, sehingga masih terdapat faktor eksternal lain yang belum dimasukkan ke dalam model penelitian. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas mutu pembelanjaan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program perlindungan sosial agar lebih berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas produktivitas masyarakat. Di sisi lain, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, para peneliti di masa mendatang disarankan untuk menyertakan lebih banyak variabel makroekonomi yang relevan, seperti pembentukan modal (investasi), tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin, maupun tingkat inflasi daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Asnidar, Putri, A., & Hanum, N. (2025). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 3(2), 166–181. <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i2.1374>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Tahun 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2024*.
- Bappeda Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023*. Jakarta: Bappeda DKI Jakarta.
- Bappeda Provinsi Maluku. (2023). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2023*. Ambon: Bappeda Provinsi Maluku.
- Barr, N. (2020). *The Economics of the Welfare State* (6th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2021). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi SPSS dan EViews)*. rajawali pers.
- Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. New York: Columbia University Press.
- Damanik, D., Panjaitan, P. D., Bagudek, T., & Purba, F. (2022). Investigating the effect of government spending on the Human Development Index in Simalungun Regency, Indonesia. *International Journal of Advances in Social Sciences and Humanities*, 1, 217–223.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fahraini, A. R., Andiny, P., & Safuridar. (2024). Dampak belanja pemerintah sektor kesehatan, sektor pendidikan dan perlindungan sosial terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 2536–2545.
- Haq, M. ul. (1995). *Reflections on Human Development*. New York: Oxford University Press.
- Harsono, I., Purnama, I., Irwan, M., Muhammad, F., & Sutanto, H. (2024). The influence of education expenditure, health expenditure and social assistance expenditure on Human Development Index in NTB Province in 2013–2022. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 802–810.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Revisi)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Informasi APBN 2024: Akselerasi Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Tahun 2023*. Jakarta: Kemendikbudristek RI.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan.
- Kurnia, T., Valeriani, D., & Darmawan, F. (2023). The influence of government spending in education, health, and economics on indicators for calculation of Human Development Index in Bangka Belitung Islands Province. *International Journal of Current Science Research and Review*, 6(7), 5158–5180. <https://doi.org/10.47191/IJCSRR/V6-i7-132>
- Murray, C. (1984). *Losing Ground: American Social Policy, 1950–1980*. New York: Basic Books.
- Musgrave, R. A. (1969). *Fiscal Systems*. New Haven: Yale University Press.
- Nurkse, R. (1953). *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. Oxford: Basil

Blackwell.

- Oktafiyana, A., & Muliati. (2024). Analisis alokasi pengeluaran pemerintah sektor ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia regional. *Jurnal Anggaran Publik*, 4(1), 45-58.
- Omairah, T., Amri, K., & Fitri, C. D. (2026). Pengaruh belanja pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 9(2), 178–193. <https://doi.org/10.33105/jmp.v3i2.463>
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Setiawan, A., & Fikriah. (2020). Pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 5(4), 212–221.
- Simamora, S. E., Andiny, P., Rizal, Y., & Safuridar. (2024). Analisis pengaruh belanja pemerintah bidang kesehatan dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 89-102.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). New York: Pearson.
- UNDP. (2015). *Human Development Report 2015: Work for Human Development*. New York: United Nations Development Programme.
- UNDP. (2023). *Human Development Report 2023: Towards Sustainable Development*. United Nations Development Programme.